

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES
TAHUN 2014 DAN 2019**

Desinta Dwi Rapita,¹ Soedarsono,² Istislam.³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Tlp. (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: desinta_rapita@yahoo.com

Abstract

Legal consideration base of judge becomes a determinant or basis for a judgement. This research aims to describe and analyze appropriateness of legal consideration base of judge in making Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in connection to implementation of Legislative and Presidential Election in accordance with pure legal consideration based on positive law or by legal consideration outside the positive law. Further, describe and analyze legal implication appeared from Verdict of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 on implementation of Legislative and Presidential Election 2014 and 2019. This research is type of legal research using normative point of view. Research approach used statute approach and conceptual approach. Type of legal material used is primary legal material and secondary legal material. Result of research shows that legal consideration base of constitutional judge in decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 in accordance with pure legal consideration based on positive law and also based on legal consideration outside the positive law. Decision of constitutional court Number 14/PUU-XI/2013 has legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. legal implication of the judgement on implementation of general election in 2014 is that Legislative and Presidential Election is not held simultaneously and according to the general election legislation, that is Law No. 42 of 2008 on Election of President and Vice President. While on general election of 2019 it will be held simultaneously in accordance with the new legislation made by the legislator.

Key word: *decision of constitutional court, legal consideration base, simultaneous general election*

¹ Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Abstrak

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu atau dasar sebuah putusan. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan mengetahui implikasi hukum putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilu tahun 2014 dan juga pemilu tahun 2019 ialah bahwa Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan tidak serentak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Pemilu akan dilaksanakan serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baru atau hasil amandemen yang dibuat oleh legislator.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, dasar pertimbangan hukum, Pemilu serentak

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan substantif seperti yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di suatu negara hukum. Melalui Putusannya, salah satunya, Mahkamah Konstitusi mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final, dalam artian tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga putusan tersebut berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik itu perorangan dan/atau lembaga negara. Hal ini dikarenakan Putusan MK sesungguhnya lebih mewakili kepentingan umum dari

pada kepentingan individual, walaupun untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang diderita.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres) dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (selanjutnya disebut Pileg) yang dilaksanakan serempak telah membawa nuansa baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Banyak argumentasi bermunculan memberikan kritikan dan dukungan terhadap Putusan MK tersebut. Pemilu, yang terdiri dari Pilpres dan Pileg yang selama ini dilaksanakan terpisah, menjadi harus dilaksanakan secara serempak. Namun, pelaksanaannya baru akan dimulai pada Pemilu 2019 nanti. Putusan ini muncul setelah adanya permohonan Pemohon, yaitu Effendi Gazali yang merasa telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon beranggapan bahwa beberapa pasal di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan bahwa Pilpres dan Pileg harus dilaksanakan serempak.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Sehingga ketentuan ini jelas bertolak belakang dengan yang diamanatkan Pasal 3 ayat (5) UU No 42 Tahun 2008, yaitu: “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*”. Selain itu berpengaruh juga terhadap pasal-pasal lain yang mempunyai hubungan langsung dengan ketentuan pasal ini, yaitu 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008.

⁴Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, sub judul “**Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan)**”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 148

Terdapat 4 (empat) poin amar putusan pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, sebagai berikut.⁵

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Secara umum elemen masyarakat bisa menerima dengan positif putusan MK tersebut. Namun terdapat beberapa kritik yang muncul terkait amar putusan dalam Putusan MK tersebut. Terlebih adanya pernyataan bahwa Pemilu 2014 tidak sah atau inkonstitusional dikarenakan dalam amar putusan sudah disebutkan bahwa beberapa Pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pemilu. Padahal pada saat dibacakan putusan tersebut, sedang berlangsung serangkaian Pemilu 2014, antara lain Pileg dan Pilpres. Namun, disebutkan dalam amar putusan tersebut bahwa pemberlakuan putusan pada amar pertama adalah untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun

⁵Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 87-88

2019 dan pemilihan umum seterusnya. Padahal putusan MK itu mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat dalam pengujian undang-undang. Artinya, tidak ada upaya hukum lagi untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Munculnya kritik maupun tafsir terhadap makna amar putusan MK ini sebenarnya bergantung juga pada kemampuan hakim MK dalam membuat putusan yang tidak ambigu atau menimbulkan banyak persepsi. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu utama dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila ada amar putusan yang tidak jelas, bisa ditelusuri dari pertimbangan hukumnya.⁶ Selain itu, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim itu juga harus memuat landasan yang jelas dan penerapan norma yang tepat oleh hakim.

Jikalau ada putusan MK yang pada akhirnya masih menimbulkan polemik, maka perlu kita analisis apakah putusan yang telah dibuat itu merupakan putusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif saja, atau didasarkan pada hal-hal diluar hukum positif, misalnya teknis penyelenggaraan pemilu yang pragmatis atau faktor keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Putusan MK, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik itu perorangan dan/atau lembaga negara. Hal tersebut dikarenakan putusan MK sesungguhnya lebih mewakili kepentingan umum dari pada kepentingan individual, walaupun untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang diderita.⁷ Mengingat bahwa putusan juga berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusan tersebut, maka sesungguhnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak ini perlu diketahui implikasinya terhadap pelaksanaan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres tahun 2014 yang sedang berlangsung pada saat putusan

⁶Maruar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)**. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211.

⁷Ibid, Jurnal Konstitusi, ... hlm.148

ini dibacakan. Selain itu juga perlu diketahui implikasi hukum Putusan MK ini terhadap pemilu tahun 2019 yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka tulisan ini membahas mengenai (1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres sudah sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif saja ataukah ada dasar lain di luar hukum positif yang digunakan oleh hakim?, dan (2) Apa implikasi hukum yang bisa timbul dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019?

Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif atau dengan pertimbangan hukum di luar hukum positif. Serta, untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum yang bisa timbul dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019.

Penulisan ini dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang seharusnya selaras dengan konstitusi. Selain itu juga memberikan gagasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berupa penemuan argumentasi hukum dan arah kebijakan negara dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum yang diamanatkan oleh konstitusi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berhubungan dengan konstiusionalitas dari konstitusi. Selain itu diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga negara pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis dan preskriptif. Penulis menganalisis tentang dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Kedua melakukan semacam hipotesa awal, kemudian memberikan simpulan terkait kesesuaian dasar pertimbangan hukum putusan terhadap pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif saja dan berdasarkan hal lain diluar hukum positif. Selanjutnya berdasarkan simpulan yang ada dianalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap Pemilu tahun 2014 dan dilanjutkan dengan implikasi hukum terhadap Pemilu tahun 2019.

Pembahasan

A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya atas Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menjadi pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.⁸ Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pada Pasal 10 ayat (1) UU MK menyebutkan juga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pengujian undang-undang. Putusan haruslah berisi tentang norma hukum yang berlaku mengikat untuk subyek, ruang, dan waktu yang tertentu.⁹ Merujuk pada teori Hans Kelsen biasa dipakai istilah *concret and individual norm*¹⁰. Selain putusan yang mengandung norma-norma yang bersifat *concret and individual norm* tersebut, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UU MK untuk mengatur sendiri

⁸ Abdul Latif, 2009, **Fungsi Mahkamah Konstitusi**, (Yogyakarta: Total Media), Hlm. 16

⁹ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 192

¹⁰ Hans Kelsen, **General Theory of Law and State**, Translate by Anders Wedberg, Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm, hlm. 125

hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga peradilan konstitusi.¹¹

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK, ialah model pengujian norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan melihat nilai konstiusionalitas norma tersebut.¹² secara umum terdapat tiga bentuk norma yang berlaku meliputi, keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*), dan keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement/vonis*).¹³ Terhadap ketiga macam norma tersebut dapat dilakukan suatu proses uji materi (*toetsingrecht*) berdasarkan pada kewenangan lembaga yang melakukannya.

Pengujian norma hukum yang dilakukan MK ialah mendasarkan pada norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945,¹⁴ sehingga sifat pengujiannya diarahkan untuk menguji nilai konstiusional norma undang-undang (*constitutional review*). Dikarenakan objek pengujiannya adalah undang-undang, maka norma hukum yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, adalah norma yang berisi atau bersifat sebagai sebuah pengaturan (*regeling*). Pengujian norma oleh MK ini merupakan bentuk pengujian norma yang ditujukan pada ketentuan pasal atau ayat pada suatu undang-undang tertentu, dan bukan pengujian terhadap seluruh materi muatan undang-undang atau disebut dengan pengujian konkret. Pengujian norma secara konkrit ini merupakan langkah strategis untuk mempertahankan hak-hak konstiusional warga, dengan mewujudkan suatu keadilan konstitusi (*constitutional justice*).¹⁵

Pengujian norma yang dilakukan oleh MK merupakan sebuah proses pengujian terhadap kaidah atau norma umum yang ada di masyarakat, bukan lagi

¹¹ Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”

¹² Ibid, Jurnal Konstitusi,... hlm. 150

¹³ Ibid, Jimly Asshiddiqie,...hlm.1-3

¹⁴ Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Unand Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan mmemutus perselisihan hasil pemilihan umum”

¹⁵ Ahmad Syahrizal. **Peradilan Konstitusi**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)0, hlm. 276-278

hanya dipandang sebagai uji kelayakan pasal atau ayat atau bagian tertentu undang-undang yang diujikan. Sehingga apabila suatu norma telah diujikan kepada MK dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, maka sesungguhnya akibat tersebut bukan hanya berdampak terhadap keberlakuan pasal atau ayat dalam lingkup undang-undang out saja, melainkan secara keseluruhan terhadap norma umum yang berlaku di masyarakat.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili Permohonan A Quo dan Pertimbangan Hukumnya terhadap Permohonan A Quo

Pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, disebutkan bahwa permohonan Pemohon ialah permohonan *a quo*. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pokok permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 ini dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008; dan

2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.

Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa berdasarkan pengelompokan di atas, maka permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan ialah apa penyelenggaraan Pilpres dilakukan setelah penyelenggaraan Pileg bertentangan dengan konstitusi? oleh karenanya perlu dipertimbangkan mengenai konstiusionalitas pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan hukum yang mengikat pada Putusan MK memiliki arti positif dan negatif. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Perkara yang demikian akan mengakibatkan putusannya *nebis in idem*.

Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa masalah konstiusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 . pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, ‘Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD’. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional.”

Putusan tersebut merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut dengan *desuetude* atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan.

Terhadap Pasal 3 ayat (5), Pemohon tetap mengajukan pengujian kepada MK. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, “1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Sehingga karena yang diajukan pengujian oleh Pemohon dasar pengujiannya berbeda, maka terhadap permohonan Pemohon ini Mahkamah Konstitusi masih mempunyai kewenangan untuk menguji.

Alasan konstitusional baru dan yang berbeda tersebut yaitu **Hak Warga Negara untuk Memilih Secara Cerdas dan Efisien pada Pemilihan Umum Serentak** sesuai yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 22E

ayat (1) yang berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.

Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini berkaitan dengan konsep *Political Efficacy* dimana warga negara dapat membangun *Peta Check and Balances* dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri. Sedangkan hak warga negara untuk memilih secara efisien pada pemilihan umum secara serentak ini terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.

C. Pokok Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013

Mahkamah Konstitusi dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pileg, paling tidak ada tiga pertimbangan pokok, antara lain:

1. Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial

Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satunya kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dimana UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Presiden mengangkat dan memberhentikan

menteri-menteri negara, dan masih banyak lagi kewenangan yang diberikan kepada Presiden.¹⁶

Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Secara umum posisi Presiden tidak tergantung pada ada tidaknya dukungan DPR. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR.

Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan juga bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi menentukan legitimasi seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD NRI Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain.

Penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pileg ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapatkan dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Dengan demikian menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.

Praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan Pelaksanaan Pilpres setelah Pileg ternyata menurut Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya tidak mampu menjadi transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil pemilu juga tidak bisa memperkuat sistem presidensial

¹⁶ Dijelaskan secara khusus mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara pada BAB III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*), terutama antara Presiden dan DPR tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi yang bersifat sesaat dan tidak bersifat jangka panjang yang dapat melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Hal ini juga menyebabkan tidak memperkuat sistem presidensial. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pileg tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

2. *Original Intent* dari pembentuk UUD NRI Tahun 1945 dan penafsiran sistematis.

Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pileg. Dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg.¹⁷ Hal

¹⁷ Diungkapkan oleh Slamet Effendy Yusuf, sebagai salah satu Panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft Perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai kesepakatan bahwa "... yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. jadi diletakkan dalam satu rezim pemilu". Dst...

demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD NRI Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa *“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Maksud penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pileg) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*, adalah tidak mungkin yang dimaksud *“sebelum pemilihan umum”* dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa *“sebelum pemilihan umum”* dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa *“sebelum pemilihan umum”* tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.

Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.¹⁸ Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD NRI Tahun 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.

3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pileg juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip

¹⁸ Pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013

konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selain pertimbangan mengenai penentuan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pileg, Mahkamah juga memberikan pertimbangan mengenai pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak. Tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pileg, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dengan pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan putusan, yaitu menyatakan pemberlakuan putusan baru akan dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Sedangkan untuk Pemilu tahun 2014 yang sedang berlangsung tetap menggunakan ketentuan UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilu yang sudah ada.

D. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum MK terhadap Pertimbangan Hukum berdasarkan Hukum Positif dan di Luar Hukum Positif

Pada Putusan tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang pada akhirnya menjadi dasar putusan adalah bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan UU 42/2008, sedangkan mengenai

konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Serentak, didasarkan pada tiga pokok pertimbangan, antara lain 1) berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan Pilpres setelah Pileg tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres setelah Pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD NRI Tahun 1945; 2) Dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg; 3) Pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Dengan demikian menurut Penulis, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutus dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 didasarkan pada hukum positif dan juga menggunakan dasar lain di luar hukum positif, misalnya faktor ekonomi, politik dan sosial. Pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif, misalnya hukum yang berlaku dalam sebuah negara, yaitu dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka menurut penulis, Putusan No 14/PUU-XI/2013 ini Mahkamah didasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pertimbangan hukum yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK, yang pada intinya sebuah putusan harus memuat²⁰:

¹⁹ Ibid, hlm. 167: Menurut Hakim Konstitusi, Ahmad Fadli Sumadi, pertimbangan hakim MK membuat putusan ialah rasio desidenndi yang bisa berdasarkan huku, bisa argumentasi, atau bisa juga pendapat hakim. Kalau pendapat hakim itu didasarkan perraturan perundang-undangan disebut rasio legis. Artinya dalam hal ini hakim bisa menemukan hukum, terutama kalau memang dalam hukum tertulis belum ada atau tidak jelas.

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pada Putusan No. 14/PUU-XI/2013 ini sudah mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ditulis sesuai dengan pengaturan sistematika sebuah putusan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada ketentuan yang berlaku pada undang-undang. Dasar pertimbangan yang dimaksud antara lain mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan UU 42/2008. Sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun.

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas– yang menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”.

Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dengan mengamanatkan agar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD NRI

Tahun 1945 menggunakan istilah “diatur dengan undang-undang”, bukan “diatur dalam undang-undang”, sehingga seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pertimbangan hukum berikutnya didasarkan pada Pasal UU 42/2008 khususnya pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*”. Norma tersebut berarti bahwa Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak). Hal ini secara nyata bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Dasar pertimbangan hukum lainnya adalah mengenai hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak ini. Jika Pilpres dan Pileg tidak dilaksanakan serentak, maka ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selain pertimbangan hukum yang berdasarkan hukum positif di atas, Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, pertimbangan hukum yang didasari oleh faktor psikologis, sosiologi, ekonomi, politik dan moral. Pertimbangan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan keadilan substantif. Pertimbangan argumentasi yaitu melalui metode penafsiran untuk menemukan hukum. Dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 ini, mengenai pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak, sesuai dengan metode *original intent* dan penafsiran sistematis. Pertimbangan lainnya dalam bidang ekonomi adalah menyangkut prinsip efisiensi penyelenggaraan pemilu. Menurut Mahkamah, Pemilu serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu Mahkamah mendasarkan pertimbangan hukumnya atas dasar untuk menghindari kekacauan yang bisa timbul dalam pelaksanaan Pilpres 2014 karena

seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa.

E. Implikasi Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berpekara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Sebab, sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi, sudah semestinya mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan.²¹

Sebagai *negative legislature*, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki implikasi hukum karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Meskipun disisi lain sudah berkembang putusan yang bersifat *positive legislature*. Dalam hal ini Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 termasuk putusan yang bersifat *negative legislature*, yang menjadi inti putusan adalah bahwa beberapa Pasal yang mengatur tentang pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang dimohonkan oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan serempak atau bersamaan; dan pemberlakuan Pemilu serempak tersebut mulai dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya.

Disisi lain pada saat proses pembuatan putusan sampai dengan dibacakan putusan sedang berlangsung serangkaian pemilihan umum tahun 2014, yaitu Pileg dan Pilpres. Tentunya banyak argumentasi yang muncul dari berbagai kalangan yang menanyakan tentang kejelasan amar putusan itu. Seperti bagaimana keabsahan Pemilu tahun 2014 yang sedang berlangsung? Mengapa putusan MK baru dibacakan disaat mendekati waktu pelaksanaan Pilpres tahun 2014? Mengapa putusan itu tidak dibacakan jauh-jauh hari sebelum Pilpres? Sebagian

²¹ Pusan Kajian Konstitus FH-UB, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, *Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupatenn Malang dan Kota Pasuruhan)*, hlm. 155

ada yang menyatakan bahwa Pemilu 2014 tidak sah atau inkonstitusional, sebagian lagi mengatakan bahwa seharusnya putusan itu ada jauh-jauh hari sebelum serangkaian persiapan Pemilu 2014 berakhir atau kalau perlu tidak perlu dibacakan dulu sampai dengan Pemilu 2014 berakhir sehingga masih banyak waktu untuk mempersiapkan peraturan yang baru mengenai pelaksanaan Pemilu berikutnya. Lebih jauh lagi ada argumentasi yang menanyakan tentang keabsahan pemilu 2009 yang juga dilaksanakan secara tidak serentak pada waktu itu. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan tersebut di atas bukanlah suatu pernyataan yang tepat. Terdapat beberapa argumentasi yang mendukung putusan Mahkamah termasuk juga memperjelas dasar pertimbangan Mahkamah membuat putusan seperti itu, antara lain sebagai berikut.

Pertama, semua tahapan pelaksanaan Pemilu dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai teknis atau tata cara pelaksanaan Pemilu telah dibuat dan diimplementasikan. Dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang sedang berlangsung menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian menyebabkan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, dengan adanya putusan ini maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pileg secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan undang-undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pileg serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

Ketiga, pelaksanaan pembatasan akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat dilakukan dengan menanggukuhkan pelaksanaan putusan *a quo* sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pileg tahun 2014.²² Selanjutnya penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus berdasarkan pada putusan Mahkamah *a quo* dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.

Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2009 dan tahun 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Pemilu 2014 yang sedang berlangsung juga harus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya rangkaian Pemilu 2014. Presiden terpilih 2014 secara langsung juga tetap sah dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini memunculkan implikasi hukum. Diantaranya akhirnya terdapat kepastian hukum mengenai pelaksanaan pemilu 2014. Sedangkan berkaitan dengan Pemilu 2019, muncul implikasi hukum bahwa Pemilu baik Pileg maupun Pilpres akan dilaksanakan serentak. Namun kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya ialah belum adanya jaminan bahwa Pemilu 2019 tidak akan menimbulkan problematika baru. Sebab, kita masih menunggu apakah legislator mampu membuat peraturan atau ketentuan mengenai mekanisme atau

²² Putusan serupa mengenai pembatasan akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan.

tata cara pelaksanaan pemilu yang komprehensif dengan segera. Sebab, kekosongan hukum yang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berbagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum ini harus segera dilaksanakan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang bisa muncul dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan bisa timbul pada Pemilu 2019 jikalau belum ada formulasi yang baik terkait amandemen UU Pemilu, ialah akan terjadi kekacauan pelaksanaan pemilu 2019. Oleh karenanya, persiapan-persiapan teknis pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan dengan matang jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Persiapan lain di luar mekanisme pelaksanaan pemilu yang menjadi faktor penentu keberhasilan pemilu juga perlu dipersiapkan. Misalnya, kesiapan lembaga KPU, kesiapan masyarakat terhadap sistem pemilu yang baru, dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa timbul dalam pelaksanaan Pemilu.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan:

- a. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif dan berdasarkan pertimbangan hukum di luar hukum positif.
- b. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 mempunyai implikasi hukum bahwa sebelum Pemilu Tahun 2019 harus ada amandemen terhadap UU Pemilu sehingga kekosongan hukum bisa teratasi.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Mukthie Fadjar, 2013, **Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi**, Setara Press, Malang.
- A.Baso Ence, Irianto. **Negara Hukum dan Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi:Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Abdul Latif, 2009, **Fungsi Mahkamah Konstitusi**, Total Media, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 1996, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, **Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2010, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Intrepetasi Undang-Undang, Volume 1 Pemahaman Awal**, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, **Peradilan Konstitusi**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2013, **Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum**, Refika Aditama, Bandung.
- Bernard L Tanya, 2000, **Hukum Politik dan KKN**, Srikandi, Surabaya.
- Bernard L Tanya, 2006, **Hukum dalam Ruang dan Waktu**, Srikandi, Jakarta.
- Hans Kelsen, **General Theory of Law and State**, Translate by Anders Wedberg, Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm.
- Jazim Hamidi, 2006, **Revolusi Hukum Indonesia**, KONpress, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham, 2006, **Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana**, Musamedia dan Nuansa, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, **Hans Kelsens: Teori Tentang Hukum**, Konstitusi press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rusli Karim, 1991, **Pemilu Demokratis Kompetitif**, Tiara Nacana Yogja, Yogyakarta

- Martitah, 2013, **Mahkamah Konsitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?**, KONpress, Jakarta.
- Maruar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)**, Sinar Grafika, Jakara
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, KONPress, Jakarta.
- Siti Malikhatul Badriyah, 2010, **Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan**, Badan Penerbitan Undip, Semarang.
- Tim Penulis Demos, 2005, **Menjadikan Demokrasi Bermakna masalah dan Pilihan di Indonesia**, Demos, Jakarta.
- Tom Lansford, 2007, **Demcracy: Political System of the World**. Marshall Cavendish: ISBN 97780761426295.
- Zainuddin Ali, 2010, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, 2011. **Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan**”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang **Mahkamah Konstitusi**.
- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum**
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang **Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang **Penyelenggara Pemilihan Umum**.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang **Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD.**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang **Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Risalah Sidang Putusan Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013